

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin P. Soeria At,adja, S.H., Dr. 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*.
- Armando, Ade , *Mengenal Lebih dekat BPK*,Biro Humas dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Bekasi
- Bohari.1992.*Pengawasan Keuangan Negara* .
- Handyaningrat, soewarno, 1986. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
- Fathoni, Abdurrahmat,2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Hadari Nawawi, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan* ,Jakarta : Erlangga
- Halim,Abdul dan Damayanti,Theresia.,2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Kadarman, 2001, *Sistem Pengawasan Management* . Jakarta: Pustaka Quantum
- Kansil,2002, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Sinar Grafika
- Saidi, Djafar. 2014.*Hukum Keuangan Negara*. Raja Grafindo, Jakarta. Hal 8
- Sofyan Safri Prof.,2004.,*Sistem Pengawasan Manajemen*.,PT Pustaka Quantum
- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Soetjipto Kery dan Sudikdiono Prawoto, 2011, *Akuntansi Pemerintahan RI Reformasi Keuangan Negara* ,
- Sarwoto, 2010, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Sudarmin, 1982, *Pedoman tentang Pemeriksaan Kas & Barang Negara* .
- Sujamto, Ir ,1983 , *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika
- ...,1987,*Aspek-Aspek Pengawasan*.Jakarta : Sinar Grafika
- ..., 1982, *Pedoman Tentang Pemeriksaan Kas & Barang Negara*,



Suwanda dadang dan Piliang Malik Akmal, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, PT Remaja Rosdakarya

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Jurnal :

<http://repository.unitomo.ac.id/96/6/BA%20JURNAL.pdf>
 diakses 7 Mei 2018

Website :

<http://makassar.tribunnews.com/2018/06/24/korupsi-pengadaan-uang-makan-dan-minum-erwin-haiyya-segera-disidang> diakses 28 April 2018

<http://makassarkota.go.id> diakses 28 April 2018



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Bukti Penelitian





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. A.P. Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan 90222
Telp. (0411) 854977-854988, Fax (0411) 854995 Website: <http://makassar.bpk.go.id>

Makassar, 24 September 2018

Nomor : 32/S/XIX.MKS/09/2018
Perihal : Jawaban atas Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Bapak A.M. Yamin SE., MS.

di

Makassar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 5819/S.01/PTSP/2018 tanggal 04 September 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa instansi kami dapat menerima mahasiswa:

Nama : Aisyah Tri Anindita

Nomor Stambuk : E12115303

Fak/Jurusan : Ilmu Pemerintah

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Widiyatmantoro
NIP 195809221986021001



Lampiran 2. Foto Penelitian





Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com

***Lampiran 3. Undang-Undang Pemeriksa, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara***



Lampiran 4. LHP Kota Makassar Tahun 2017





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Makassar. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

wakiln Provinsi Sulawesi Selatan

vii

f



BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Makassar tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 34.B/LHP/XIX/05/2018 dan Nomor 34.C/LHP/XIX/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 25 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Pri Heriyanto, SE.,MM.,MA.,Ak.,CA
Registri Akuntan No. 17063





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2017.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar,
Pt. WALIKOTA MAKASSAR

SYAMSU RIZAL MI



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	(%)	Realisasi Tahun 2016
1	2	3	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	1.059.991.478.000,00	938.796.384.191,06	88,57	752.142.501.992,98
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	101.559.741.000,00	72.788.075.037,56	71,67	128.471.643.140,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	45.287.319.000,00	45.023.066.147,08	99,42	15.562.590.481,88
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	278.027.399.000,00	280.623.568.856,40	100,93	75.683.017.990,90
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.484.865.937.000,00	1.337.231.094.232,10	90,06	971.859.753.605,76
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.a	128.623.570.000,00	114.981.453.962,00	89,39	109.645.984.333,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.b	5.355.989.000,00	3.735.395.178,00	69,74	7.503.124.911,00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.c	1.300.764.306.000,00	1.300.764.306.000,00	100,00	1.324.023.135.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.d	257.056.784.000,00	253.486.011.263,00	98,61	551.575.386.038,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.691.800.649.000,00	1.672.967.166.403,00	98,89	1.992.747.630.282,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Penyesuaian		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	0,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	0,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		306.765.424.000,00	366.638.439.266,00	119,52	304.485.818.811,30
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		306.765.424.000,00	366.638.439.266,00	119,52	304.485.818.811,30
23	Total Pendapatan Transfer		2.006.066.073.000,00	2.047.105.605.669,00	102,05	2.297.233.449.093,30
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	235.845.582.414,00
26	Bantuan Keuangan		11.520.000.000,00	17.018.518.800,00	147,73	41.711.370.332,00
27	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		26.520.000.000,00	32.018.518.800,00	120,73	277.556.952.746,00
30	JUMLAH PENDAPATAN		3.517.452.010.000,00	3.416.355.218.701,10	97,13	3.546.650.155.445,06
31	BELANJA	7.5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.254.090.169.639,00	1.193.157.695.155,00	95,14	1.450.479.947.166,00
34	Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	1.553.800.562.305,00	1.409.619.453.503,66	90,72	1.115.184.992.271,00
35	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	800.000.000,00	254.324.108,38	31,79	583.283.988,69
36	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	86.666.067.750,00	76.924.413.515,00	88,76	76.328.270.950,00
38	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	47.161.000,00
39	Jumlah Belanja Operasi		2.895.356.799.694,00	2.679.955.886.282,04	92,56	2.642.623.655.375,69
40	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
41	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	22.758.042.600,00	3.861.152.420,00	16,97	41.595.473.792,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	200.762.855.619,00	182.790.683.855,40	91,05	196.604.104.825,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	156.524.447.912,00	113.572.141.933,00	72,56	106.493.266.617,00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	359.594.235.575,00	286.102.528.031,00	79,56	283.818.503.347,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	36.445.547.500,00	35.628.111.498,00	97,76	2.363.396.976,00
46	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	4.321.188.100,00	3.065.255.800,00	70,94	3.662.206.000,00
47	Jumlah Belanja Modal		780.406.317.306,00	625.019.873.537,40	80,09	634.536.951.557,00
48	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga		10.000.000.000,00	7.556.531.068,00	75,57	82.616.150,00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga		10.000.000.000,00	7.556.531.068,00	75,57	82.616.150,00
51	JUMLAH BELANJA		3.685.763.117.000,00	3.312.532.290.887,44	89,87	3.277.243.223.082,69



No.	Uraian	Reff	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	(%)	Realisasi Tahun 2016
1	2	3	3	4	5	6
52	TRANSFER	7.5.1.3				
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN	7.5.1.3.1				
54	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN		0,00	0,00	0,00	0,00
58	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.2				
59	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bantuan Keuangan Lainnya		1.097.743.000,00	1.091.333.000,00	99,42	1.097.743.000,00
61	JUMLAH TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN		1.097.743.000,00	1.091.333.000,00	99,42	1.097.743.000,00
62	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		3.686.860.860,00,00	3.313.623.623.887,44	0,90	3.278.340.966.082,69
63	SURPLUS/DEFISIT		(169.408.850.000,00)	102.731.594.813,66	(0,61)	268.309.189.362,37
64	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1				
66	Penggunaan SilPA		173.408.850.000,00	173.408.850.770,73	100,00	144.731.959.987,36
67	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pinjaman Dalam Negeri - lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	3.580.000,00	0,00	3.370.000,00
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		173.408.850.000,00	173.412.430.770,73	100,00	144.735.329.987,36
81	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.2				
82	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	235.845.582.414,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		4.000.000.000,00	3.790.086.165,00	94,75	3.790.086.165,00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Jumlah Pengeluaran		4.000.000.000,00	3.790.086.165,00	94,75	239.635.668.579,00
94	PEMBIAYAAN NETO		169.408.850.000,00	169.622.344.605,73	100,13	(94.906.338.591,64)
95	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	7.5.1.3.3	0,00	272.353.939.419,39	0,00	173.408.850.770,73

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Makassar, 25 Mei 2018
 Pdt. WALIKOTA MAKASSAR,
 Dr. H. SYAMSU RIZAL MI, S.Sos, M.Si



Lampiran 5. Surat Pemeriksaan BPK





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. A.P. Pettarani, Telp. (0411) 854977, Fax. (0411) 854995, Makassar, Sulawesi Selatan

Makassar, 2 Maret 2017

Nomor : 37/ Pendahuluan-LKPD/Kota Makassar/03/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Data Pengadaan Barang

Yth. Walikota Makassar
di
Makassar

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Makassar sesuai Surat Tugas 21/ST/XIX.MKS/02/2017 tanggal 3 Februari 2017, dengan ini kami mohon untuk diberikan informasi terkait pengadaan barang non e-katalog sesuai format terlampir.

Kami harapkan informasi tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2017. Dokumen tersebut agar dapat disampaikan kepada Tim LKPD Kota Makassar TA 2016 di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Jl. AP Pettarani Lantai 4 Ruang Sub Auditorat Sulsel l. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Budi Rahayu
NIP.197212081998032003

Tembusan:

1. Yth. Pengendali Teknis Pemeriksaan Pendahuluan
atas LKPD Kota Makassar TA 2016

